

**OTONOMI PEREMPUAN ATAS TUBUHNYA DALAM PERATURAN-  
PERATURAN HUKUM TENTANG ABORSI YANG BERLAKU DI  
INDONESIA**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan oleh:

**LOVIA ULFA**

NIM: 22.C1.0037

**Kepada**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**  
**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**  
**SEMARANG**

**2026**

## ABSTRAK

Aborsi merupakan isu hukum yang kompleks karena berada di persinggungan antara perlindungan kehidupan janin, keberlangsungan umat manusia, dan pengakuan atas otonomi perempuan atas tubuhnya. Di Indonesia, pengaturan hukum mengenai aborsi masih sangat dipengaruhi oleh paradigma moral dan religius yang menempatkan tubuh perempuan sebagai objek kontrol negara, dengan kriminalisasi sebagai kerangka utama. Meskipun peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, telah memberikan pengecualian terhadap larangan aborsi dalam kondisi kedaruratan medis dan kehamilan akibat kekerasan seksual, pengecualian tersebut tidak serta-merta mewujudkan otonomi perempuan atas tubuhnya karena masih dibatasi oleh berbagai persyaratan normatif dan prosedural.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara aborsi dan otonomi perempuan atas tubuhnya serta mengkaji sejauh mana pengaturan hukum aborsi di Indonesia mencerminkan pengakuan terhadap pengalaman perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kritis-feminis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur hukum feminis yang relevan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara aborsi dan otonomi tubuh perempuan atas tubuhnya bersifat fundamental, namun tidak dapat dipahami secara sederhana melalui dikotomi *pro-life* dan *pro-choice*. Pendekatan feminis mengungkap bahwa keputusan aborsi lahir dari situasi dilematik yang kompleks, di mana perempuan harus mempertimbangkan kondisi ekonomi, pendidikan atau karier, relasi sosial, tekanan budaya, serta nilai dan keyakinan personalnya. Namun, pengaturan hukum aborsi di Indonesia belum sungguh-sungguh mewujudkan otonomi tubuh perempuan. Negara masih mempertahankan pola paternalistik melalui pembatasan waktu aborsi yang berlandaskan tafsir religius, persyaratan persetujuan pihak ketiga, prosedur administratif yang rumit, keterbatasan fasilitas kesehatan, serta pengaturan khusus bagi korban kekerasan seksual yang justru berpotensi menimbulkan viktimisasi berlapis. Keseluruhan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa tubuh perempuan masih diposisikan sebagai objek kontrol negara, sehingga pengakuan formal terhadap aborsi tidak berbanding lurus dengan pengakuan nyata atas otonomi perempuan atas tubuhnya.

**Kata Kunci:** *Aborsi, Otonomi Perempuan atas Tubuhnya, Hak Reproduksi, Feminisme, Teori Hukum Feminis, Pengaturan Hukum Aborsi.*

## ABSTRACT

*Abortion is a complex legal issue situated at the intersection of the protection of fetal life, the continuity of humankind, and the recognition of women's bodily autonomy. In Indonesia, the legal regulation of abortion remains strongly influenced by moral and religious paradigms that position women's bodies as objects of state control, with criminalization serving as the primary legal framework. Although statutory instruments, such as Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code and Law Number 17 of 2023 on Health, provide exceptions to the prohibition of abortion in cases of medical emergencies and pregnancies resulting from sexual violence, these exceptions do not automatically realize women's bodily autonomy due to the persistence of restrictive normative and procedural requirements.*

*This research aims to analyze the relationship between abortion and women's bodily autonomy and to examine the extent to which abortion regulations in Indonesia reflect genuine recognition of women's lived experiences. The research employs a normative juridical legal method, using statutory, conceptual, and feminist critical approaches. Data were collected through a literature-based study of statutory regulations, legal doctrines, and relevant feminist legal literature.*

*The findings demonstrate that the relationship between abortion and women's bodily autonomy is fundamental, yet cannot be adequately understood through a simplistic pro-life versus pro-choice dichotomy. A feminist approach reveals that abortion decisions emerge from complex dilemmatic situations in which women must consider economic conditions, educational or career trajectories, social relations, cultural pressures, and personal values and beliefs. Nevertheless, abortion regulation in Indonesia has not yet substantively realized women's bodily autonomy. The state continues to maintain a paternalistic pattern through gestational time limits grounded in religious interpretations, third-party consent requirements, burdensome administrative procedures, limited access to health facilities, and specific regulations for survivors of sexual violence that may result in layered victimization. Taken together, these regulatory patterns indicate that women's bodies remain positioned as objects of state control, resulting in a disparity between the formal recognition of abortion and the substantive recognition of women's bodily autonomy.*

**Keywords:** *Abortion, Women's Bodily Autonomy, Reproductive Rights, Feminism, Feminist Legal Theory, Abortion Law Regulation.*